

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmad dan hidayah-Nya, sehingga **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2020**, dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep ini dilakukan, sebagai tindak lanjut dari perencanaan strategik dalam rangka mendukung budaya transparansi, merupakan upaya pertanggungjawaban setiap program melalui pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja setiap kegiatan, program, kebijaksanaan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menjadi kesadaran mendalam, bahwa dalam pembuatan LKjIP ini masih banyak ditemui kekurangan. Untuk itu segala input konstruktif dan inovatif, sangat diharapkan guna kesempurnaan pelaksanaan Program Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dimasa yang akan datang.

Akhirnya penghargaan dan ungkapan terima kasih yang setinggi-tingginya, kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan LKjIP ini, dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan dan perencanaan kebijakan selanjutnya.

Sumenep, Januari 2021  
KEPALA BADAN PENDAPATAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN SUMENEP

RUDI YUYIANTO, SE, M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197003 18199803 1005

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep. Disamping itu, LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep melaporkan capaian kinerja (performance result) sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2020.

Sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Strategik tahun 2020, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep melaksanakan 53 (Lima puluh tiga) kegiatan dari 9 (Sembilan) program untuk mendukung pencapaian 2 misi ( Misi 3 dan 4 ). Keberhasilan pencapaian tersebut diukur melalui indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian dalam LKjIP tahun 2020 ini menunjukkan keberhasilan masing-masing tujuan dan sasaran, namun demikian masih dijumpai beberapa kekurangan yang masih perlu mendapatkan perhatian oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep. Kekurangan dan upaya perbaikan yang akan dilakukan telah diuraikan secara lengkap pada bagian evaluasi akuntabilitas kinerja.

Pada akhirnya, Laporan ini merupakan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, segala kekurangan yang masih dijumpai tidak menyebabkan lemahnya motivasi tetapi justru menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Sumenep, Januari 2021  
KEPALA BADAN PENDAPATAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN SUMENEP

RUDI YUYIANTO, SE, M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197003 18199803 1005

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud Dan Tujuan .....	1
C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	2
D. Struktur Organisasi BPPKAD .....	5
<b>BAB II PERENCANAANKINERJA.....</b>	<b>7</b>
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	7
B. Sasaran Dan IKU BPPKAD.....	8
C. Tujuan Dan Sasaran Beserta Indikator Dan Target Tahun 2020 .....	9
D. Perjanjian Kinerja .....	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>12</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	12
B. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya .....	12
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir Renstra. ....	12
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan .....	13
E. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA .....	14
F. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA.....	15
G. Realisasi Anggaran .....	18
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>21</b>
Lampiran .....	22

## **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

### **BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka bersama ini kami Laporkan Kinerja Perangkat Daerah atas Perjanjian Kinerja yang telah disepakati sebelumnya. Pelaporan Kinerja selain berpedoman kepada selain berpedoman kepada ketentuan PermenpanRB tersebut di atas, juga telah diselaraskan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah selain berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi kepada publik atas penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, juga berfungsi sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah direncanakan dan diperjanjikan, serta sebagai bahan pertimbangan memutuskan kebijakan dalam rangka upaya perbaikan kinerja instansi pemerintah.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya LKjIP adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Tujuan penyusunan LKjIP selain sebagai salah satu alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja daerah juga untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep. Keberhasilan, permasalahan, dan solusi yang tertuang dalam LKjIP menjadi sumber untuk bahan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

### C. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUMA

Setelah dilakukan analisa tentang gambaran pelayanan, kajian atas hasil evaluasi pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja serta kajian atas pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah terdapat beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas, pokok dan tatakerja. Perumusan isu-isu penting tersebut memiliki maksud untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD. Adapun isu penting terkait penyelenggaraan tugas, pokok dan tatakerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah masih rendah atau sebaliknya sumber pendapatan daerah Kabupaten Sumenep masih banyak tergantung pada sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat atau bersumber dari Dana Perimbangan;
2. Masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah dalam mendanai belanja daerah;
3. Rendahnya kapasitas fiskal;
4. Porsi belanja pegawai terhadap belanja daerah masih tinggi;
5. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah;
6. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyajikan informasi yang jelas dan lengkap. Hal tersebut telah mewujudkan tata kelola asset daerah yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan asset daerah sehingga data barang barang milik daerah yang akurat ;
7. Masih terdapat OPD yang tidak konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA OPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran.
8. Rekomendasi dan catatan strategis atas isu penting terkait penyelenggaraan tugas, pokok dan tatakerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah nomor 1) peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah atau sebaliknya berkurangnya ketergantungan pendapatan daerah Kabupaten Sumenep terhadap pendapatan dari Pemerintah Pusat atau bersumber dari Dana Perimbangan, 2) bertambahnya kontribusi pendapatan asli daerah dalam mendanai belanja daerah dan 3) bertambahnya kapasitas fiskal daerah, strategi yang diambil yaitu optimalisasi pendapatan asli daerah terutama dari pendapatan pajak dan retribusi daerah.

Optimalisasi pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan yaitu sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai berikut:
  - a. Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi) sistem perpajakan dan retribusi daerah;
  - b. Penyempurnaan landasan hukum serta law enforcement bagi pengenaan pajak dan retribusi daerah;
  - c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
  - e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait; dan
  - f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah.
2. Sedang ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dilaksanakan memperkuat basis pajak dan retribusi daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
  - b. Pengkajian atas potensi dari jenis retribusi baru dan potensi pajak daerah dilaksanakan dengan kerjasama pihak ke 3 (tiga);
  - c. Optimalisasi penyerapan pendapatan dari pajak daerah terutama dari PBB P2 dan BPHTB yang telah menjadi pajak daerah.
3. Meningkatkan pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan meningkatkan kontribusi pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif yang dapat ditempuh dengan perbaikan manajemen, peningkatan profesionalisme BUMD, serta memperkuat permodalan melalui penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah yang dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan daerah.
4. Terwujudnya tertib administrasi dalam tata kelola aset daerah dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah sehingga data barang milik daerah dapat disajikan dengan akurat telah dicapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Dalam rangka meningkatkan keakuratan data barang milik daerah, strategi yang diambil optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Kebijakan yang diambil adalah inventarisasi, klarifikasi dan penataan barang milik daerah. Cara yang ditempuh untuk mendukung strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan komitmen kepala OPD/Unit Kerja selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam mengelola barang daerah secara tertib administrasi sesuai aturan berlaku;
  - b. Meningkatkan pemahaman pengelola barang milik daerah SKPD/Unit Kerja tentang Peraturan Bupati Sumenep Nomor 55 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedure Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sumenep melalui kegiatan forum komunikasi pengurus barang milik daerah;
  - c. Dipergunakan SIMBADA dalam pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan, dan akuntansi;
  - d. Melaksanakan klarifikasi dan inventarisasi barang milik daerah yang dipergunakan OPD/Unit Kerja sebagai tindak lanjut atas temuan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah;
  - e. Meningkatkan pemahaman pengurus barang melalui bimbingan teknik dan pendampingan pengurus barang dalam pengelolaan barang daerah dari pencatatan aset daerah, barang yang berasal dari pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi aset untuk peningkatan PAD serta optimalisasi aset bagi pengguna barang OPD.
5. OPD diharapkan konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang dalam DPA OPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar tidak terjadi di akhir tahun anggaran. Strategis yang dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Meningkatkan disiplin anggaran bagi seluruh OPD agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan alokasi dalam DPA/DPPA OPD;
  - b. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD dalam rangka dilakukan evaluasi penyerapan atas anggaran belanja seluruh OPD serta di anggaran belanja pada seluruh OPD dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
  - c. Melaksanakan pelatihan kepada seluruh pengelola keuangan OPD tentang implementasi SIMDA Keuangan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah;

#### Organisasi BPPKAD

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah telah dibentuk organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Sebagai unsur pelaksana di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang merupakan gabungan dari Bagian Keuangan yang membidangi pengelolaan keuangan

daerah, Bagian Perlengkapan yang membidangi pengelolaan aset/kekayaan daerah dan Badan Pendapatan Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan daerah. Dalam perkembangan kebutuhan, karakteristik, kemampuan dan potensi daerah guna mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah.

#### D. STRUKTUR ORGANISASI BPPKAD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2008 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai organisasi perangkat daerah melaksanakan urusan otonomi daerah pada bidang administrasi keuangan daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, terdapat tiga fungsi yang melekat pada kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yaitu sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pembantu pengelola barang daerah (Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Daerah), dan selaku Pengguna anggaran/pengguna barang daerah. Ke-tiga fungsi tersebut diatas menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dari Bupati Sumenep selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan barang daerah kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengelola pendapatan, keuangan dan barang daerah. Pelimpahan wewenang tersebut ditetapkan dengan keputusan Bupati Sumenep berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, memiliki ketugasan yaitu melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Pengkoordinasian Program Kerja pelaksanaan tugas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset;
2. Pelaksanaan Program dan kebijakan teknis di Bidang Pendapatan;
3. Pelaksanaan Program dan kebijakan teknis di Bidang Penatausahaan Keuangan;
4. Pelaksanaan Program dan Kebijakan teknis di Bidang Aset;
5. Pelaksanaan Program dan Kebijakan teknis di Bidang Pembukuan dan Verifikasi;
6. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD )
7. Pelaksanaan Fungsi Bendahara Umum Daerah;

8. Penyusunan Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD )
9. Pelaksanaan Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan serta Penghapusan Barang milik Daerah;
10. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 tanggal 17 Desember 2008, (terlampir)

## **BAB II**

### **PERENCANAAN**

#### **A. VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN**

Untuk itu Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) periode 2016-2021 adalah “**Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintah Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional**”. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi.

Adapun Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai berikut

1. Potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing yang tinggi.
2. Meningkatkan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan kultur dan tata kelolapemerintahan yang professional dan akuntabel.
5. Meningkatkan tatakelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melauai partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan.
6. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta rasionalisme yang didukung kearifan local dalam kehidupan masyarakat.

Terhadap Visi diatas mengandung pengertian bahwa Badan PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun ke depan akan mengarahkan dan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih yang diarahkan untuk menuju kota yang maju.

Tugas dan fungsi BPPKAD yang terkait dengan Visi Misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Tugas dan Fungsi BPPKAD ini berhubungan dengan Misi ke 4 (empat) Misi Pembangunan sumenep tahun 2016-2021 yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel**. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep melaksanakan tugas, pokok dan tata kerja dijiwai dengan semangat dan komitmen melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Pemerintah Kabupaten Sumenep secara akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab dalam rangka

mewujudkan *good and clean government*. Berlandaskan atas semangat dan komitmen juga berupaya mewujudkan sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah berdasarkan azas secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; dan
2. Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi aset dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

#### A. SASARAN DAN IKU BPPKAD

Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut diatas telah terkait dengan Visi Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Tugas dan Fungsi BPPKAD ini berubungan dengan Misi ke 4 (empat) Misi Pembangunan Sumenep Tahun 2016-2021 yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel** yang telah disesuaikan dengan sasaran Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut terdapat 31 sasaran Pemerintah Kabupaten Sumenep, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset bertanggungjawab atas terwujudnya sasaran ke-pertama dan ke-tiga dari tujuan dan misi empat yaitu “**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel**” dengan arah kebijakan inventarisasi, klarifikasi dan penataan aset daerah dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Adapun sasaran Indikator tujuan ke-tiga Kabupaten Sumenep adalah nilai opini BPK untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Keuangan Daerah BPPKAD. Sebagai alat yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yaitu dengan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (key performance indikator) memiliki peran dalam merubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realitis. Berikut ini akan disajikan rumusan sasaran dan IKU Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu sebagai berikut:

### Rumusan sasaran dan IKU BPPKAD

Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus
Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Nilai Opini atas audit BPK	Opini pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK
	2. Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK	$\frac{\text{Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total Jumlah Temuan}} \times 100\%$
Meningkatkan Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	1. Persentase Pertumbuhan PAD	$15\% - \left( \frac{100\% - \% \text{capaian}}{15\%} \right)$
	2. Presentase PAD terhadap APBD	$\frac{\text{PAD}}{\text{APBD}} \times 100\%$

#### C. TUJUAN DAN SASARAN BESERTA INDIKATOR DAN TARGET TAHUN 2020

Target Tujuan dan sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2020 dari masing-masing sasaran strategis pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep dengan target adalah sebagai berikut :

#### Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020	Target Akhir Tahun 2021
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Nilai Opini atas audit BPK	WTP : 1 WDP : 2	1	1
		2. Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK	%	90	90

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020	Target Akhir Tahun 2021
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yg Baik dan Akuntabel	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	1. Persentase Pertumbuhan PAD	%	15	15
		2. Presentase PAD terhadap APBD	%	11,18	11,87

#### D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta kinerja utama yang akan dicapai yang ditentukan dengan mempertimbangkan tema pembangunan dan sumber daya yang tersedia.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1  
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Presentase PAD terhadap APBD	11.18 %
		2 Nilai Opini atas audit BPK	WTP
		3 Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK	90%
2.	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	1 Persentase Pertumbuhan PAD	15%

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dari dua sasaran strategis yang diperjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dilakukan pengukuran realisasi dan capaian kinerja, baik Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran maupun Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Tujuan. Adapun realisasi kinerja dimaksud sebagai berikut :

Tabel 2.3.2  
Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran Renstra 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	3. Presentase PAD terhadap APBD	%	11.18	11.5	102.86
		4. Nilai Opini atas audit BPK	WTP : 1 WDP : 2	1	-	-
		5. Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK	%	90	-	-
2	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	3. PersentasePertumbuhan PAD	%	15	15.06	100.40

Tabel 2.3.3  
Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Tujuan Renstra 2020

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap APBD	%	11,18	11,50	102,86
2	Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan	OPINI Atas hasil Pemeriksaan BPK-RI	WTP = 1 WDP = 2	1	-	Menunggu hasil audit

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	yang baik dan Akuntabel					BPK

## B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Untuk memberikan informasi peningkatan realisasi kinerja 3 (tiga) tahun terakhir maka kami sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Presentase PAD terhadap APBD	%	8.28	9.81	11.5
		2. Nilai Opini atas audit BPK	WTP / WDP	WTP	WTP	-
		3. Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK	%	75	75	-
2	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	1. PersentasePertumbuhan PAD	%	13.81	14.74	15.06

Tabel 2.3.5  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir

NO	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap APBD	%	8.28	9.81	11.50
2	Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik dan Akuntabel	OPINI Atas hasil Pemeriksaan BPK-RI	WTP = 1 WDP = 2	1	1	-

## C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan target kinerja yang harus dicapai pada tahun akhir Renstra, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.6

## Capaian Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Kinerja Sasaran Akhir Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Presentase PAD terhadap APBD	%	11.5	11.87	71,37%
		2. Nilai Opini atas audit BPK	WTP / WDP	WTP	WTP	WTP
		3. Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK	%	-	95	75
2	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	1. Persentase Pertumbuhan PAD	%	15.06	15	14.74

Tabel 2.3.7

## Capaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Tujuan Akhir Renstra

NO	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap APBD	%	11,50	11,87	102,86
2	Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik dan Akuntabel	OPINI Atas hasil Pemeriksaan BPK-RI	WTP = 1 WDP = 2	1	1	1

#### D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Sasaran 1 dipengaruhi oleh :  
Program/Kegiatan

Sasaran 1 : Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan kinerja Pemerintah

Keberhasilan kinerja sasaran 1 ditunjang oleh tercapainya target kinerja Program :

- a. Administrasi Perbendaharaan Daerah
- b. Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- c. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Anggaran
- d. Penatausahaan dan Tata kelola Administrasi Aset

Sedangkan tercapainya kinerja program tersebut ditunjang dengan keberhasilan kinerja sebanyak 25 kegiatan

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep berhasil melakukan efisiensi dan mendorong efektivitas belanja daerah yang dibuktikan dengan meraih opini BPK-RI Wajar Tanpa Perkecualian ( WTP ) 3 (tiga) kali berturut-turut dari tahun 2017, 2018, 2019

Sasaran 2 : Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah  
Keberhasilan kinerja sasaran 2 ditunjang oleh tercapainya target kinerja Program :

- a. Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Penagihan serta Pembinaan Pajak dan Retribusi Daerah

Sedangkan tercapainya kinerja program tersebut ditunjang dengan keberhasilan kinerja sebanyak 10 kegiatan , dimana telah melakukan optimalisasi penerimaan PAD diantaranya bekerja sama dengan Pusdatin BPN Pusat dan Bank Jatim berkenaan dengan optimalisasi dan transparansi pengelolaan pajak BPHTB dengan menggunakan online system ( E-BPHTB ), menerapkan / menempatkan Billy sintem terhadap Hotel dan Restoran dalam rangka optimalisasi pajak Hotel dan Restoran. Capaian indicator Kinerja Utama Perangkat Daerah dari Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah telah mencapai 100,40% dari target 15% dengan realisasi 15,06%.

#### E. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya pada tahun 2020, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi atas realisasi kinerja Sasaran Renstra sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.8

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Atas Realisasi Kinerja Sasaran Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Presentase PAD terhadap APBD	%	11.18	11.5	102.86	448.982.993	369.140.352	82,22	20.64
		2. Nilai Opini atas audit BPK	WTP / WDP	WTP	WTP	100%	3.133.293.444	1.657.964.488	78.72	21.28
		3. Persentase Tindak Lanjut	%	90	-	-	-	-	-	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Thp Temuan BPK								
2	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	1. Persentase Pertumbuhan PAD	%	15	15.06	100.4	866.216.250	795.189.250	91,80	8.6

## F. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA

Tingkat capaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi baik sasaran, program maupun kegiatan sebagai outcome tujuan pembangunan daerah. Adapun realisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.9  
Realisasi Kinerja Tahun 2020

No.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALIASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>SASARAN I : Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah</b>				
<b>I.1</b>	<b>Program Administrasi Perbendaharaan Daerah</b>	<b>administrasiperbendaharaandaerah yang tertib dan efisien</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
I.1.1	Pengelolaan Kasda	Pengelolaaninformasi dan kebijakan kas umumdaerah	114 set	114 set	100%
I.1.2	Penyusunan Administrasi Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Pengelolaan dana DAK dan pelaporan	4 laporan	4 laporan	100%
I.1.3	Pelaksanaan Pengelolaan Proses SP2D Belanja Langsung	Jumlah SP2D yang benardinamdingkandenganjumlah total SP2D yang diterbitkan	18000 lbr	18000 lbr	100%
I.1.4	Pembinaan Bendahara	OPD pembinaanbendahara	58 opd	58 opd	100%
I.1.5	Pengelolaan Belanja Tidak Langsung	Pelaksanaanverifikasi dan validasipemrosesanbelanjatidaklangsung	2500 lbr	2500 lbr	100%
I.1.6	Pembinaan dan Pendampingan Sistem Informasi Penggajian PNS	Jumlahpeserta yang mengikutipendampingan	58 opd	58 opd	100%
I.1.7	Penyusunan Administrasi Pelaporan DAK Non Fisik	Jumlah data pelaporan DAK yang tersusun	399 item	399 item	100%
<b>I.2</b>	<b>Program Pengelolaan &amp; Pertanggungjawaban Keuangan Daerah</b>	<b>Pengelolaan dan PertanggungJawabanKeuangandaerah yang tertib</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
I.2.1	Penyusunan Laporan konsolidasi dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlahbukuhasilrealisasi APBD OPD semesteran dan prognosis	150 buku	150 buku	100%

I.2.2	Penyusunan laporan realisasi pendapatan dan pengelolaan kas sebagai laporan triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah laporan bulanan dan triwulanan penerima daerah tahun berjalan	400 buku	400 buku	100%
I.2.3	Penyusunan laporan realisasi belanja dan penatausahaan SPJ sebagai laporan triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah laporan bulanan dan triwulanan belanja daerah	400 buku	400 buku	100%
I.2.4	Penyusunan persiapan pelaporan keuangan daerah	Jumlah data penyusunan laporan keuangan daerah	16 item	16 item	100%
I.2.5	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	Jumlah buku tentang pertanggungjawaban APBD	600 buku	600 buku	100%
I.2.6	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah buku peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	865 buku	865 buku	100%
<b>I.3</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Anggaran</b>	<b>Pengelolaan Anggaran daerah yang baik dan benar</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
I.3.1	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Jumlah rancangan perbupenjabaran APBD	75 buku	75 buku	100%
I.3.2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah rancangan perda perubahan APBD	75 buku	75 buku	100%
I.3.3	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah rancangan perbupenjabaran perubahan APBD	75 buku	75 buku	100%
I.3.4	Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan	Jumlah data yang akurat mengenai target PAD, dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang sah	2 buku	2 buku	100%
I.3.5	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Anggaran	Jumlah buku dokumen pengelolaan anggaran	145 buku	145 buku	100%
I.3.6	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Anggaran Kas	Penerbitan anggaran kas semua OPD tahun 2020	58 opd	58 opd	100%
<b>I.4</b>	<b>Program Penatausahaan dan Tata Kelola Administrasi Aset</b>	<b>Penatausahaan barang milik daerah yang tertib</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100</b>
I.4.1	Analisa aset Daerah	Jumlah buku standarisasi harga barang yang dibuat	80 buku	80 buku	100%
I.4.2	Penyusunan Akuntansi Aset Daerah	Jumlah daftar aktiva tetap yang dibuat	58 opd	58 opd	100%
I.4.3	Penghapusan Aset Daerah	Jumlah daftar perubahan status hukum barang sesuai usulan OPD di lingkungan Kab, Sumenep	58 opd	58 opd	100%
I.4.4	Penertiban Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep	Ketertiban pengelolaan aset/ barang milik daerah	50 sertifikat	47 sertifikat (proses bpn)	94%
<b>II</b>	<b>SASARAN II : Meningkatkan Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah</b>				
<b>II.1</b>	<b>Program pengembangan Potensi PAD.</b>	<b>Peningkatan yang mendukung peningkatan Pajak dan retribusi Daerah</b>	<b>9 Pajak dan 1 Retribusi</b>	<b>9 Pajak dan 1 Retribusi</b>	<b>100%</b>
II.1.1	Pengelolaan Basis Data SISMIOP dan SIG	Data SUbyek/obyek PBB dilakukan pemutakhiran	100 nop	100 nop	100%
II.1.2	Pengelolaan data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	9 jns pajak	9 jns pajak	100%
II.1.3	Analisa Zona Nilai Tanah	Jumlah Wilayah yang dilakukan updating data nilai tanah sesuai zona	5 kec.	5 kec.	100%
II.1.4	Penerbitan Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah	<b>9 Pajak dan 1 Retribusi</b>	<b>9 Pajak dan 1 Retribusi</b>	100%
II.1.5	Pemeriksaan dan Pengendalian Wajib Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang dikendalikan	9 jns pajak	9 jns pajak	100%
II.1.6	Penerbitan dan Pengendalian SPPT dan PBB-P2	Jumlah SPPT dan PBB-P2 yang diterbitkan	744.000 lbr	744.000 lbr	100%
<b>II.2</b>	<b>Program Peningkatan, Pengelolaan Pelayanan Penagihan serta Pembinaan Pajak dan Retribusi Daerah (PRD)</b>	<b>Prosentase peningkatan pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>

II.2.1	Penagihan dan Penanganan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah (PRD)	Jumlah Pajak dan Retribusi daerah yang ditagih	10 pajak/rebs	10 pajak/rebs	100%
II.2.2	Pembinaan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang terbina	500 orng	500 orng	100%
II.2.3	Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Produk hukum di bidang pajak dan retribusi daerah yang disusun	4 produk hkm	4 produk hkm	100%
II.2.4	Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Wajib Pajak dan Retribusi yang dilayani	10 item	10 item	100%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja yaitu :

- I. Tujuan 1 : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik dan Akuntabel.  
 Sasaran Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 100% ( masih proses pemeriksaan ( BPK-RI ) dengan indicator Opini hasil Pemeriksaan BPK-RI, Persentase Tindak lanjut terhadap Tamuan BPK-RI , belum terealisasi disebabkan masih dalam proses Pemeriksaan BPK-RI atas target Wajar Tanpa Perkecualian ( WTP ) Keberhasilan sasaran tersebut ditunjang dengan keberhasilan program diantaranya :
  - i) Program Pengembangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebesar 100% dengan indicator Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang tertib terealisasi 100% atas target 100% Keberhasilan Program tersebut ditunjang dengan keberhasilan kegiatan diantaranya :
    - Kegiatan Penyusunan Persiapan Pelaporan Keuangan Daerah sebesar 100% dengan indicator Jumlah data penyusunan laporan keuangan daerah terealisasi 16 item atas target 16 item Adapun aksi kegiatan dimaksud yang kami laksanakan adalah Menyiapkan data dan bahan penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah..
  
- II. Tujuan 2 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  
 Sasaran Meningkatkan Kemandirian Keuangan Pemerintah sebesar 100,40% dengan indicator Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) terealisasi 15,06% atas target 15% Keberhasilan Program tersebut ditunjang dengan keberhasilan kegiatan diantaranya :
  - Kegiatan Pengelolaan data potensi pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 100%% dengan indicator Kontribusi daerah dan retribusi daerah terealisasi 9 jenis pajak daerah atas target 9 jenis pajak daerah Adapun aksi kegiatan dimaksud yang kami laksanakan adalah Asistensi pembuatan peta block

## G. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran program/kegiatan merupakan realisasi penyerapan anggaran program/kegiatan tahun anggaran 2020. Adapun realisasi program/kegiatan secara rinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6.11

### Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
I.	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	5.374.954.099,00	4.950.567.570,00	92,10
I.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	711.333.172,00	436.481.289,00	61,36
I.2	Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	23.504.400,00	23.128.300,00	98,40
I.3	Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	340.120.439,00	339.418.300,00	99,79
I.4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	268.982.500,00	263.007.010,00	97,78
I.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	78.300.000,00	76.940.000,00	98,26
I.6	Penyediaan makanan dan minuman	198.430.000,00	184.378.300,00	92,92
I.7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	168.715.000,00	94.628.377,00	56,09
I.8	Peringatan Hari-Hari Besar	0,00	0,00	0,00
I.9	Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	2.324.352.000,00	2.312.872.000,00	99,51
I.10	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	505.570.000,00	505.570.000,00	100,00
I.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/umah dinas	213.000.000,00	191.815.300,00	90,05
I.12	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/umah dinas	149.360.000,00	146.937.910,00	98,38
I.13	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	232.238.588,00	214.968.707,00	92,56
I.14	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/umah dinas	161.048.000,00	160.422.077,00	99,61
II	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0	0	0
II.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	0,00	0,00
II.2	Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	0,00	0,00	0,00
III	<b>Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>689.075.000,00</b>	<b>289.126.465,00</b>	<b>41,96</b>

III.1	Penyusunan Laporan Keuangan	38.324.000,00	38.302.000,00	99,94
III.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	162.026.000,00	141.001.000,00	87,02
III.3	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	488.725.000,00	109.823.465,00	22,47
IV	<b>Program pengembangan Potensi PAD.</b>	<b>866.216.250,00</b>	<b>795.189.250,00</b>	<b>91,80</b>
IV.1	Pengelolaan Basis Data SismiOP dan SIG	212.538.000,00	211.791.000,00	99,65
IV.2	Pengelolaan data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	104.594.000,00	76.594.000,00	73,23
IV.3	Analisa Zona Nilai Tanah	61.611.000,00	61.611.000,00	100,00
IV.4	Penerbitan Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	226.265.000,00	225.865.000,00	99,82
IV.5	Pemeriksaan dan Pengendalian Wajib Pajak Daerah	193.244.250,00	164.744.250,00	85,25
IV.6	Penerbitan dan Pengendalian SPPT dan PBB-P2	67.964.000,00	54.584.000,00	80,31
V	<b>Program Peningkatan, Pengelolaan Pelayanan Penagihanserta Pembinaan Pajak dan Retribusi Daerah (PRD)</b>	<b>448.982.993,00</b>	<b>369.140.352,00</b>	<b>82,22</b>
V.1	Penagihan dan Penanganan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah (PRD)	117.748.000,00	93.089.600,00	79,06
V.2	Pembinaan Pajak dan Retribusi Daerah	201.861.000,00	193.841.709,00	96,03
V.3	Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah	39.847.000,00	0,00	0,00
V.4	Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	89.526.993,00	82.209.043,00	91,83
VI.1	<b>Program Administrasi Perbendaharaan Daerah</b>	<b>299.915.594,00</b>	<b>282.834.326,00</b>	<b>94,30</b>
VI.2	Pengelolaan Kasda	58.877.744,00	54.722.907,00	92,94
VI.3	Penyusunan Administrasi Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	55.371.000,00	53.471.000,00	96,57
VI.4	Pelaksanaan Pengelolaan Proses SP2D Belanja Langsung	113.550.000,00	113.550.000,00	100,00
VI.5	Pembinaan Bendahara	27.650.000,00	27.650.000,00	100,00
VI.6	Pengelolaan Belanja Tidak Langsung	27.430.000,00	21.410.519,00	78,06
VI.7	Pembinaan dan Pendampingan Sistem Informasi Penggajian PNS	11.635.950,00	7.108.000,00	61,09
VI.8	Penyusunan Administrasi Pelaporan DAK Non Fisik	5.400.900,00	4.921.900,00	91,13
VII	<b>Program Pengelolaan &amp; Pertanggungjawaban Keuangan Daerah</b>	<b>467.016.100,00</b>	<b>456.518.175,00</b>	<b>97,75</b>
VII.1	Penyusunan Laporan konsolidasi dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	41.410.000,00	37.887.000,00	91,49
VII.2	Penyusunan laporan realisasi pendapatan dan pengelolaan kas sebagai laporan triwulanan, semesteran dan tahunan	37.390.000,00	37.180.000,00	99,44
VII.3	Penyusunan laporan realisasi belanja dan penatausahaan SPJ sebagai laporan triwulanan, semesteran dan tahunan	63.100.900,00	63.100.700,00	100,00
VII.4	Penyusunan persiapan pelaporan keuangan daerah	63.160.000,00	61.777.000,00	97,81

VII.5	PenyusunanRancanganPeraturan Daerah tentangPertanggungjawaban APBD	211.955.200,00	207.073.475,00	97,70
VII.6	PenyusunanRancanganPeraturan KDH tentangPenjabaranPertanggungjawabanPelaksanaan APBD	50.000.000,00	49.500.000,00	99,00
VIII	<b>Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaanAnggaran</b>	<b>775.070.000,00</b>	<b>624.669.122,00</b>	<b>80,60</b>
VIII.1	PenyusunanRancanganPeraturan KDH TentangPenjabaran APBD	41.650.000,00	268.690.760,00	85,16
VIII.2	PenyusunanRancanganPeraturan Daerah TentangPerubahan APBD	275.351.000,00	1.100.000,00	2,64
VIII.3	PenyusunanRancanganPeraturan KDH tentangPenjabaranPerubahan APBD	61.150.000,00	251.796.720,00	91,45
VIII.4	PenyusunanRencanaAnggaranPendapatan	3.406.000,00	42.535.642,00	69,56
VIII.5	PenyusunanDokumenPengelolaanAnggaran	17.000.000,00	495.000,00	14,53
VIII.6	PenyusunanDokumenPelaksanaanAnggaran dan Anggaran Kas	61.000.000,00	11.887.000,00	69,92
IX	<b>Program Penatausahaan dan Tata Kelola AdministrasiAset</b>	<b>900.216.750,00</b>	<b>48.164.000,00</b>	<b>78,96</b>
IX.1	Analisa aset Daerah	17.040.000,00	287.108.499,00	31,89
IX.2	PenyusunanAkuntansiAset Daerah	39.898.000,00	14.070.000,00	82,57
IX.3	PenghapusanAset Daerah	344.938.750,00	39.532.000,00	99,08

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja BPPKAD tahun 2020 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala BPPKAD kepada Bupati Sumenep yang telah memberi amanah dan tugas sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Pencapaian atas ke dua indikator kinerja dari sasaran strategis yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) BPPKAD sebagaimana yang diatur dalam pada Peraturan Bupati Sumenep tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021, dapat disimpulkan sudah sesuai dengan target bahkan melebihi target katagori Sangat Baik. Rata-rata capaian indikator kinerja dari masing-masing sasaran sebagai berikut:

- Sasaran I Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah yang Transparan dan Akuntabel rata-rata capaian ke-dua indikator kinerja sebesar diatas 100% katagori Sangat Baik. Capaian tersebut memberi gambaran pengelolaan keuangan dan aset daerah di Pemerintah Kabupaten Sumenep semakin tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tujuan utama yaitu mewujudkan good governance dan clean goverment.
- Sasaran II Meningkatkan PAD rata-rata capaian indikator kinerja mendapatkan prosentase diatas 100% maka capaian tersebut masuk katagori **Sangat Baik**. Capaian tersebut menginformasikan tentang peranan pendapatan asli daerah semakin meningkat dalam memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah dan mendanai belanja daerah.

Hasil pengukuran kinerja ke dua indikator kinerja utama BPPKAD tahun 2020 disimpulkan Dua indikator kinerja dengan katagori Sangat Baik.

-

**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

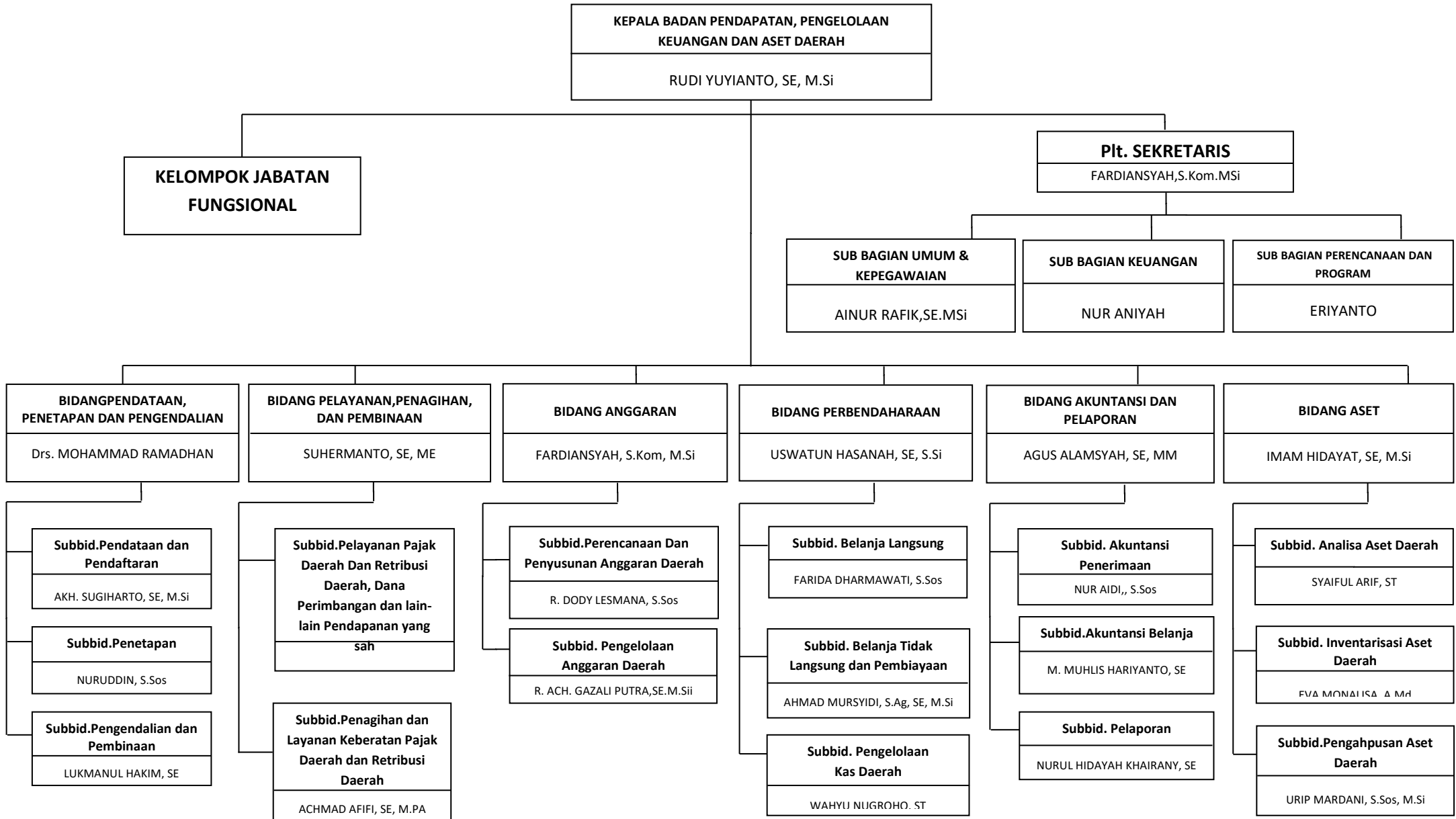
**RUDI YUYIANTO, SE, M.Si.**

Pembina

NIP. 197003 18199803 1005

# Daftar Lampiran

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Tabel 2.5

**Pagu Anggaran Belanja Langsung Per sasaran dan Per Indikator Kinerja Tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan Anggaran	
1	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah dan Kekayaan Daerah								
		Opini Pemeriksaan BPK		( proses audit BPK )	-				
		- Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	WTP			689.075.000	83.018.625	12.05	87.95
		- Program Administrasi Perbendaharaan Daerah				299.915.594	166.516.176	55.52	44.48
		- Program Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Daerah				467.016.100	194.721.175	41.69	58.31
		- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Anggaran				775.070.000	59.012.555	7.61	92.39
		- Program Penatausahaan dan Tata Kelola Administrasi Aset				900.216.750	83.777.939	9.31	90.69
		Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK	90	( proses audit BPK )	-				

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan Anggaran	
2	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	Presentase Pertumbuhan PAD - Program Pengembangan Potensi PAD	15%	15,06%	100,40	866.216.250	709.216.250	81,88	18,12
		Persentase PAD Terhadap APBD - Program Peningkatan, Pengelolaan Pelayanan Penagihan serta Pembinaan Pajak dan Retribusi Daerah (PRD)	11,18%	11,50%	102,86	448.982.993	106.639.951	23,75	76,25

**Tabel 3.2****Pertumbuhan Pendapatan Daerah pada BPPKAD Selaku PPKD  
Tahun 2019 & Tahun 2020**

Uraian	REALISASI		Bertambah (berkurang)	
	2019	2020	Rupiah	%
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	246,421,640,622.62	260,498,814,058.57	14,077,173,435.95	5.71
Hasil Pajak Daerah	33,549,325,944.00	32,365,904,163.00	(1,183,421,781.00)	(3.53)
Hasil Retribusi Daerah	20,096,479,667.00	18,117,339,176.00	(1,979,140,491.00)	(9.85)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	16,254,103,472.81	15,822,662,838.22	(431,440,634.59)	(2.65)
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	176,521,731,538.81	194,192,907,881.35	17,671,176,342.54	10.01
DANA PERIMBANGAN	1,645,545,460,462.00	1,487,090,215,701.00	(158,455,244,761.00)	(9.63)
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	136,067,317,165.00	102,687,153,173.00	(33,380,163,992.00)	(24.53)
Dana Alokasi Umum	1,183,078,444,000.00	1,090,899,516,000.00	(92,178,928,000.00)	(7.79)
Dana Alokasi Khusus	326,399,699,297.00	293,503,546,528.00	(32,896,152,769.00)	(10.08)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	624,541,666,619.87	570,045,956,454.00	(54,495,710,165.87)	(8.73)
Pendapatan Hibah	60,752,500,536.87	72,262,499,491.00	11,509,998,954.13	18.95
Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	121,312,542,083.00	105,903,820,563.00	(15,408,721,520.00)	(12.70)
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	352,231,105,000.00	367,239,350,800.00	15,008,245,800.00	4.26
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	90,245,519,000.00	24,640,285,600.00	(65,605,233,400.00)	(72.70)
<b>Jumlah PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2,516,508,767,704.49</b>	<b>2,317,634,986,213.57</b>	<b>(198,873,781,490.92)</b>	<b>(7.90)</b>
BELANJA DAERAH			-	

BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,440,668,877,831.10	1,623,432,773,833.51	182,763,896,002.41	12.69
Belanja Pegawai	837,267,130,805.10	847,647,345,478.35	10,380,214,673.25	1.24
Belanja Hibah	75,903,601,600.00	192,302,292,300.00	116,398,690,700.00	153.35
Belanja Bantuan Sosial	13,966,050,000.00	14,197,450,000.00	231,400,000.00	1.66
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	0.00	2,004,732,906.71	2,004,732,906.71	
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	510,731,909,106.00	507,497,188,380.00	(3,234,720,726.00)	(0.63)
Belanja Tidak Terduga	2,800,186,320.00	59,783,764,768.45	56,983,578,448.45	2,034.99
BELANJA LANGSUNG	882,455,046,762.37	874,133,196,920.76	(8,321,849,841.61)	(0.94)
Belanja Pegawai	66,814,536,613.20	22,942,361,399.00	(43,872,175,214.20)	(65.66)
Belanja Barang Dan Jasa	448,360,778,594.01	494,789,520,898.32	46,428,742,304.31	10.36
Belanja Modal	367,279,731,555.16	356,401,314,623.44	(10,878,416,931.72)	(2.96)
Jumlah BELANJA DAERAH	2,323,123,924,593.47	2,497,565,970,754.27	174,442,046,160.80	7.51
Surplus / (Defisit)	193,384,843,111.02	(179,930,984,540.70)	(373,315,827,651.72)	(193.04)
PEMBIAYAAN			-	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	486,282,609,651.32	742,374,231,933.34	256,091,622,282.02	52.66
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	486,068,535,484.32	667,167,452,762.34	181,098,917,278.02	37.26
Pencairan Dana Cadangan	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	214,074,167.00	206,779,171.00	(7,294,996.00)	(3.41)
Penerimaan Dana dari Transfer Deposito		25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	
Jumlah PENERIMAAN PEMBIAYAAN	486,282,609,651.32	742,374,231,933.34	256,091,622,282.02	52.66

DAERAH				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	12,500,000,000.00	75,000,000,000.00	62,500,000,000.00	500.00
Pembentukan Dana Cadangan	12,500,000,000.00	0.00	(12,500,000,000.00)	(100.00)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	75,000,000,000.00	75,000,000,000.00	
Jumlah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	12,500,000,000.00	75,000,000,000.00	62,500,000,000.00	500.00
Pembiaayan Netto	473,782,609,651.32	667,374,231,933.34	193,591,622,282.02	40.86
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	667,167,452,762.34	487,443,247,392.64	(179,724,205,369.70)	(26.94)

**Tabel 3.3****Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola  
BPPKAD Tahun 2020**

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	78,718,284,294.13	93,104,985,879.95	14,386,701,585.82	118.28
411	Hasil Pajak Daerah	28,136,500,000.00	32,365,904,163.00	4,229,404,163.00	115.03
412	Hasil Retribusi Daerah	201,074,250.00	198,638,750.00	(2,435,500.00)	98.79
413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15,822,662,838.22	15,822,662,838.22	0.00	100.00
414	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	34,558,047,205.91	44,717,780,128.73	10,159,732,922.82	129.40
	Jumlah PENDAPATAN DAERAH	78,718,284,294.13	93,104,985,879.95	14,386,701,585.82	118.28
5	BELANJA DAERAH				
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	36,632,268,152.00	35,399,270,841.55	(1,232,997,310.45)	96.63
511	Belanja Pegawai	36,632,268,152.00	35,399,270,841.55	(1,232,997,310.45)	96.63
52	BELANJA LANGSUNG	9,821,446,786.00	8,055,153,759.00	(1,766,293,027.00)	82.02
521	Belanja Pegawai	1,144,431,000.00	1,069,861,000.00	(74,570,000.00)	93.48
522	Belanja Barang Dan Jasa	7,594,456,293.00	5,922,212,797.00	(1,672,243,496.00)	77.98
523	Belanja Modal	1,082,559,493.00	1,063,079,962.00	(19,479,531.00)	98.20
	Jumlah BELANJA DAERAH	46,453,714,938.00	43,454,424,600.55	(2,999,290,337.45)	93.54
	Surplus / (Defisit)	32,264,569,356.13	49,650,561,279.40	17,385,991,923.27	